

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Untuk pemegang saham perseroangan

Nama :

Alamat :

No. KTP/ Paspor :

Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No. KTP/ Paspor :

Dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham dari:

Nama Perusahaan : PT. Leo Investments, Tbk

Jumlah Saham :

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**".

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan Kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

----- K H U S U S -----

Untuk bertindak dan mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan menyampaikan suara selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut:

Perusahaan : PT. Leo Investments, Tbk

Hari/Tanggal : Senin / 18 Januari 2021

Lokasi : Jl. Imam Bonjol No.68, Menteng, Jakarta Pusat

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**")

No.	MATA ACARA RAPAT RUPS TAHUNAN	Mohon diisi dengan tanda [✓] sesuai pilihan		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
2	Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
3	Penunjukkan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan			
4	Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan			
5	Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan			

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan Surat Kuasa ini pada setiap mata acara Rapat sebagaimana disebutkan di atas.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau mengkonfirmasi bahwa suara untuk mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana diperlukan.

Surat Kuasa ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini.

....., Januari 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai
Rp6.000,-

Nama :

Nama:

Petunjuk:

- Tulis nama dan alamat Pemberi Kuasa dalam huruf kapital di tempat yang telah disediakan (akan diisi oleh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 17 Desember 2020).
- Tandai dengan (✓) di kotak yang sesuai dimana Anda bermaksud memberikan suara. Jika tidak ada tanda yang diberikan, berarti bahwa Penerima Kuasa diizinkan untuk tidak memberikan suara (abstain) atau melakukannya berdasarkan pertimbangannya sendiri.
- Tuliskan jumlah saham yang terkait dengan Surat Kuasa ini. Surat Kuasa hanya berlaku untuk jumlah saham yang disebutkan disini.
- Tanda tangan Pemberi Kuasa dibubuhkan dengan meterai Rp6.000,-.

Catatan:

- Surat Kuasa ini harus diterima oleh Perusahaan paling lambat tanggal 13 Januari 2021 melalui Biro Administrasi Efek (PT. SINARTAMA GUNITA) yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat 10350 Tel: (021) 392 2332, Fax: (021) 392 3003 atau melalui email helpdesk1@sinartama.co.id
- Penerima Kuasa yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan KTP atau Identitas kependudukan lainnya dan memberikan fotokopinya kepada resepsionis Perusahaan sebelum memasuki ruang Rapat.
- Untuk pemegang saham dalam bentuk badan hukum, diwajibkan untuk menyediakan salinan Anggaran Dasar terbaru dan perubahannya lengkap dengan surat penerimaan dan pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagaimana berlaku) serta komposisi manajemen terbaru badan hukum tersebut.